

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE PADA DESA DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS
KABUPATEN BUNGO**

*THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, PARTICIPATION, AND
SUPERVISION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS TO ACHIEVE GOOD
GOVERNANCE IN THE VILLAGE IN TANAH SEPENGGAL LINTAS BUNGO DISTRICT*

WetaMardiana^{1*} Laula Dwi Marthika^{2*} dan Gita Suliska^{3*}

¹²³Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No 27, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kode Pos :37214
mardianaweta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 Desa dan Sampelnya sebanyak 72 Responden. Teknik penarikan sampelnya adalah *Purposive Sampling*. Berdasarkan Uji t bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, dan Pengawasan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Berdasarkan Uji F bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi; Pengawasan; Pengelolaan Dana Desa; Good Governance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability, transparency, participation, and supervision on the management of village funds to realize good governance in villages in Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency. The population in this study were 12 villages and the sample was 72 respondents. The sampling technique is purposive sampling. Based on the t-test that Accountability, Transparency, Participation partially affect Village Fund Management to realize Good Governance in villages in Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency, and Supervision does not partially affect Village Fund Management to realize Good Governance in villages in Tanah Sepenggal District Cross Bungo Regency. Based on Test F that Accountability, Transparency, Participation, and Supervision have a simultaneous effect on Village Fund Management to realize Good Governance in villages in Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency.

Keywords: Accountability; Transparency; Participation; Supervision; Village Fund Management; Good Governance.

PENDAHULUAN

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas beradadiwilayah barat Kabupaten Bungo, sebelah barat berbatasdengan Kecamatan Tanah Sepenggal, disebelah timur berbatas dengan Kecamatan Bathin III, sebelah utara berbatas dengan kabupaten Tebo, dan sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Tanah Tumbuh. Kecamatan ini terletak di 17 km dengan waktu tempuh lebih kurang 15 menit dari ibu kota Kabupaten Bungo. Di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo terdapat 12 desa dengan total perangkat desa 194 orang yang terdiridari RIO, SEKDUS, KAUR/KASI, KEPALA KAMPUNG dan BPD. Jumlah penduduk 22.166 jiwa dengan jenis kelaminan laki-laki 11.483 jiwa dan jenis kelaminan perempuan 10.683 jiwa.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan dana desa, kebijakan merupakan suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau perintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 kebijakan yang mengatur dana desa menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prioritas pembangunan seperti jalan, sedangkan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pemberdayaan UKM desa. Berikut dana desa yang diperuntukanuntuk 12 desa.

Tabel 1. Pagu Dana Desa TA 2019 dan 2020

No	Desa	2019	2020
1.	Sungai Mancur	Rp. 952.455.000	Rp. 987.013.000
2.	Tanah Periuk	Rp. 748.332.000	Rp. 776.824.000
3.	LubukLandai	Rp. 817.076.000	Rp. 848.378.000
4.	Rantau Embacang	Rp. 715.235.000	Rp. 739.663.000
5.	Tebing Tinggi	Rp. 914.277.000	Rp. 927.991.000
6.	Paku Aji	Rp. 708.546.000	Rp. 729.145.000
7.	EmbacangGedang	Rp. 713.426.000	Rp. 727.553.000
8.	Sungai Puri	Rp. 726.874.000	Rp. 739.347.000
9.	Pematang Panjang	Rp. 917.569.000	Rp. 937.794.000
10.	Sungai Tembang	Rp. 864.435.000	Rp. 883.834.000
11.	Sungai Lilin	Rp. 923.265.000	Rp. 938.845.000
12.	Rantau Makmur	Rp. 766.868.000	Rp. 780.077.000

Sumber: Kantor Camat Tanah SepenggalLintas, 2020

Menunjukkan adanya alokasi dana desa yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke 12 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas untuk TA. 2019 dan 2020. Kucuran Dana Desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa dengan masyarakat setempat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, serta Pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya, seperti melaksan akan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo diharapkan melakukan sesuai prinsip *Good Governance* yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadinya kesenjangan antar sesama masyarakat serta tidak terjadinya Korupsi di Desa Tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Pemerintah Desa menyampaikan informasi mengenai Laporan APB Desa kepada Masyarakat melalui media informasi tertulis kepada masyarakat, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengenai Laporan APB Desa, Laporan Realisasi APB Desa dan pelaksana kegiatan anggaran. Akan tetapi berdasarkan observasi

yang dilakukan ada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas terdapat 6 kantor desa diantaranya yaitu Desa Tanah Periuk, Sungai Lilin, Pematang Panjang, Rantau Embacang, Sungai Mancur dan Rantau Makmur yang tidak melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran tentang penggunaan keuangan desa, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat juga mengatakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang keuangan desa (Wawancara, Masyarakat, tanggal 12 Januari 2021, pukul 13.40 WIB).

Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Karena masyarakat juga ikut serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Rendahnya transparansi juga dapat dilihat dimana tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, hanya mereka yang terlibat dalam TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran dana yang dikelola oleh desa. Fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut,

dikarenakan masih banyak artikel dan beberapa sumber mengatakan masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Seperti dilansirnya salah satu dari media Online pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa *National Corruption Wachat (NCW)* Kabupaten Bungo menyerahkan berkas adanya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di salah satu Desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Tersangka memberikan kesaksian bahwa sebagian dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus tersebut, tersangka selaku Kepala Desa langsung dinonaktifkan dan digantikan dengan Kepala Desa yang baru untuk memudahkan jalannya kegiatan pelayanan administrative masyarakat desa setempat. Dikutip dalam www.jambi-independen.co.id. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Weny Ultrafiah (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi untuk mewujudkan *Good Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1.1. *Good Governance*

Good Governance sebagai pemerintahan yang baik serta sebagai suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan efesien, penghindaran salah alokasi dana, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2018).

1.2. Akuntabilitas

Mahmudi (2016) mengemukakan Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi manfaat (*principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.3. Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.

1.4.Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2013).

1.5.Pengawasan

Menurut Mardiasmo (2013) mengemukakan Pengawasan merupakan suatu kegiatan dimanapihak luar yang dipilih sebagai pengawas melihat langsung dan mengetahuiapa yang sebenarnya terjadi. Pengawasan pada intinyamerupakan kegiatan yang dijalankan dalam mencapai tujuan, untuk menghindar penyelewengan dan kecurangan

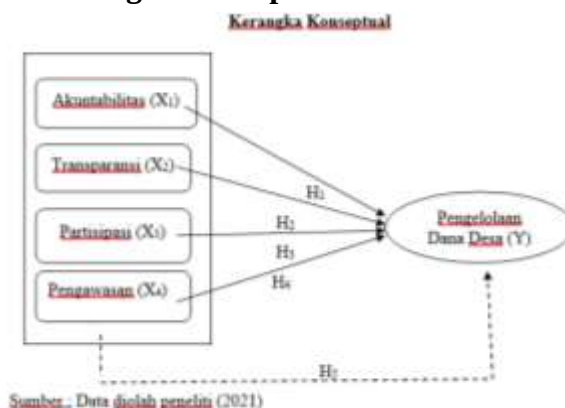
1.6.Pengelolaan Dana Desa

BerdasarkanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagimasyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporanhingga pertanggungjawaban yang

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

2.1.Kerangka Konseptual



2.2. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.2.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

Mahmudi (2015) mengemukakan Akuntabilitas adalah suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Serta pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kepada public atau pemegang

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas setiap aktivitas yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Weny Ultrafiah (2018) yang menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh Giofani Inge Aria.H (2019) yang berjudul Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Menyatakan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilihat dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal ini menegaskan bahwa, dengan dilaksanakannya akuntabilitas dalam mengelola dana desa oleh aparatur desa, maka penulis mengajukan hipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

2.2.2. Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa

Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi adalah prinsip kebebasan untuk semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, maupun hasil-hasil yang dicapai. Upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan desa harus terbuka atas informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau oleh publik.

Upaya dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan dan informasi adalah awal perencanaan penyusunan Dana Desa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Weny Ultrafiah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasiterhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh Debi (2017) menyatakan Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran berkonsep

value of money. Maka penulis mengajukan hipotesis bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H₂:Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

2.2.3.Pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan dana desa

Menurut Mardiasmo (2009) mengemukakan partisipasi dibangun atas kebebasan berasosiasi dan berbicara. Yang berarti setiap masyarakat berhak bersuara dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan masukan pikiran, dan waktu. Partisipasi juga dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat memberi masukan guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah dan baik.

Weny Ultrafiah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh Devi Indra Kartika (2019) menyatakan Partisipasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Maka penulis mengajukan hipotesis bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H₃:Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

2.2.4. Pengaruh Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa

Menurut Mardiasmo (2012) Pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pengawasan pada intinya merupakan kegiatan yang dijalankan dalam mencapai tujuan, untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan.

Pengawasan suatu desa ditetapkan dengan tujuan-tujuan perencanaan, membandingkan kegiatannyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukuran penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya desa dipergunakan dengan cara yang efektif dan

efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang terarah, sehingga terhindar dari penyelewengan dana desa tersebut. Debi (2017) dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money*. Menyatakan pengawasan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran.

Maka penulis mengajukan hipotesis bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H4: Pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

2.2.5. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa

Menurut Muindor (2013) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jika tidak terpenuhi prinsip akuntabilitas akan menimbulkan implikasi

yang luas dilingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa. Alokasi dana yang cukup besar maka diperlukan pengawasan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang terarah dan menghindari terjadinya kecurangan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Partisipasi menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

H5 : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dapat digunakan untuk

meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015).

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel yang terkait dalam penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi partisipasi dan pengawasan yang merupakan variable independen, dan pengelolaan dana desa yang merupakan variable dependen. Subjek penelitian ini adalah Kantor Camat Tanah Sepenggal lintas Kabupaten Bungo. Lokasi penelitian akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena pengelolaan Dana Desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola yang baik.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, serta diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber dan aparatur desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti: gambaran umur organisasi, struktur usaha, arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab (Sugiyono, 2015). Data yang diperoleh dengan menjabarkan suatu daftar pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap tentang objek yang diteliti pada responden. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasinya adalah 12 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Dalam penelitian ini seluruh populasi akan diteliti dengan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Kriteria yang digunakan untuk memilih kriteria responden adalah para aparatur dan pejabat tim pengelolaan Dana Desa dan yang akan ditunjuk yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KASI Kesra dan 2 dari tokoh masyarakat yaitu Tokoh Lembaga Adat dan Ketua Pemuda. Maka dalam setiap desa akan diambil 6 responden. Dengan jumlah seluruh responden sebanyak 72 responden.

Tabel 2 Desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas yang menjadi populasi

No	Nama Desa	Responden
1	Sungai Mancur	6
2	Tanah Periuk	6
3	Lubuk Landai	6
4	Rantau Embacang	6
5	Tebing Tinggi	6
6	Paku Aji	6
7	Embacang Gedang	6
8	Sungai Puri	6
9	Pematang Panjang	6
10	Sungai Tembang	6
11	Sungai Lilin	6
12	Rantau Makmur	6
	Total Responden	72

Sumber : Data diolahPeneliti (2021)

Tabel 3 Defenisi Operasional Variabel

No	Variable	Definisi	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas (X₁)	Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2013)	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas finansial	Ordinal
2	Transparansi (X₂)	Transparansi adalah pemberian pelayanan public harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan	

3	Partisipasi (X3)	(Mahmudi, 2016) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009)	1. Pengambilan keputusan 2. Pelaksanaan 3. Pengambila manfaat 4. Evaluasi	Ordinal
4	Pengawasan (X4)	Pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Mardiasmo (2012).	1. Input (masukan) 2. Proses 3. Output (Keluaran)	Ordinal
5	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (PP NO. 113 tahun 2014)	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap Penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban	Ordinal

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis Regresi Linier Berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variable independen (X) terhadap variable dependen

(Y). Untuk meyakinkan bahwa variable bebas mempunyai pengaruh terhadap variable terikat. Formula untuk regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = VariabelPengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

b₁₋₂ = KoefesienRegresi

X₁ = VariabelAkuntabilitas

X₂ = VariabelTransparansi

X₃ = VariabelPartisipasi

e = StandarError

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji Asumsi Klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t merupakan pengujian hipotesis koefesien regresi berganda dengan hanya satu B yang mempengaruhi Y. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independent secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2016).

Menurut Ghozali (2016) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variable bebas yang dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen.

Menurut Gozali (2016) Uji koefesien determinasi (R₂) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable

dependen. Nilai koefesiendeterminasi (R₂) adalah antara 0 dan 1.

Uji Normalitas dengan One-Sample

Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	72
Normal Mean	.0000000
Parame Std. Deviation	1.8120099
ters ^{a,b}	0
Most Absolute	.107
Extrem Positive	.107
e Negative	
Differe	-.097
nces	
Test Statistic	.107
Asymp. Sig. (2-tailed)	.056 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber :Output SPSS Versi 22

Unstandardized residual memiliki taraf signifikan lebih besar dari pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa data peneliti di setiap variabel yang diteliti berdistribusi normal dan dapat digunakan pada hipotesis selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas pada Model Regresi Linear Berganda yang terbentuk dari Hasil Penelitian

Variabel	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>		Hasil Uji Multikolinearitas
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Akuntabilitas (X1)	0,131	7,606	Tidak ada multikolinearitas
Transparansi (X2)	0,119	8,423	Tidak ada multikolinearitas
Partisipasi (X3)	0,300	3,333	Tidak ada multikolinearitas
Pengawasan (X4)	0,131	7,657	Tidak ada multikolinearitas

Dependent Variabel : Y

Sumber : Output SPSS versi 22

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan variable Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi (X3), dan Pengawasan (X4) masing-masing memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation factor* (VIF) < 10. Berdasarkan

hasil uji multikolinearitas tersebut, maka dapat disimpulkan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi (X3), dan Pengawasan (X4) menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dan dapat digunakan pada hipotesis selanjutnya.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.118	2.936		.721	.473		
	Akuntabilitas	.221	.098	.297	2.268	.027	.131	7.606
	Transparansi	.256	.100	.352	2.554	.013	.119	8.423
	Partisipasi	.231	.102	.195	2.250	.028	.300	3.333
	Pengawasan	.131	.128	.135	1.027	.308	.131	7.657

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Menunjukkan bahwa nilai Signifikan absid dari masing-masing variable setelah dilakukan uji hetereskodastisitas menunjukkan nilai signifikan > 0,05 atau

5%. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang terbentuk dari hasil Penelitian ini memiliki kesamaan varian dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya gejala

heterokedastisitas dan dapat digunakan pada hipotesis selanjutnya.

**Tabel 6 Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.118	2.936		.721	.473
	Akuntabilitas	.221	.098	.297	2.268	.027
	Transparansi	.256	.100	.352	2.554	.013
	Partisipasi	.231	.102	.195	2.250	.028
	Pengawasan	.131	.128	.135	1.027	.308

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Bentuk analisis linear berganda dari penelitian ini berdasarkan pada data tabel 4.723 adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2,118 + 0,221X_1 + 0,256X_2 + 0,231X_3 + 0,131X_4 + e$$

Adapun Analisis model persamaan regresi linear berganda di atas sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) = 2,118.

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa bila Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan pengawasan diansumsikan memiliki nilai konstan atau nol (0) maka Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo sebesar 2,118.

2. Nilai koefisien persamaan regresi linear berganda pada variable Akuntabilitas (X_1) = 0,221 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo sebesar 0,221 satu satuan.
3. Nilai koefisien persamaan regresi linear berganda pada variable Transparansi (X_2) = 0,256 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Transparansi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah

Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo sebesar 0,256 satu satuan.

4. Nilai koefisien persamaan regresi linear berganda pada variable Partisipasi (X3) = 0,231 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Partisipasi meningkatkan maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di

desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo sebesar 0,231 satu satuan.

5. Nilai koefisien persamaan regresi linear berganda pada variable Pengawasan (X4) = 0,131 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Pengawasan meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada

Hasil Uji f dalam Pengujian Hipotesis

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1337.065	4	334.266	95.541	.000 ^b
Residual	213.420	61	3.499		
Total	1550.485	65			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Output Versi 22

Hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 95,541$ dan nilainya $> \text{nilai } F_{tabel} = 3,98$ pada taraf signifikansi = 5%. Nilai signifikansi dari $F_{hitung} = 0,000$ dan nilainya lebih kecil dari pada nilai signifikansi = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis diterima dan dapat disimpulkan responden di desa

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo sebesar 0,131 satu satuan.

Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.862	.853	1.870

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Output SPSS Versi 22

Hasil uji koefisien determinasi (uji R^2) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,853. Hasil ini menunjukkan 85,3% bahwa Akuntabilitas, Transparansi, partisipasi, dan Pengawasan berkontribusi positif dan dapat dijelaskan terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah

Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Dan faktor-faktor lainnya diluar variable penelitian dan tidak diteliti dalam penelitian ini yang memiliki kontribusi sebesar 14,7% terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

PEMBAHASAN

4.1.1.

Pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Akuntabilitas (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} = 2,268 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,997$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Variabel Akuntabilitas memiliki taraf signifikan $\alpha < \text{nilai signifikan } \alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan Hipotesis diterima dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas

4.1.2.

Pengaruh Transparansi secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Transparansi (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} = 2,554 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,997$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Variabel Transparansi memiliki taraf signifikan $\alpha < \text{nilai signifikan}$

$\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan Hoipotesis diterima dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

4.1.3.

PengaruhPartisipasisecaraparsialterhadapPengelolaan Dana Desauntukmewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Partisipasi (X3) memiliki nilai $t_{hitung} = 2,250 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,997$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Variabel Partisipasi memiliki taraf signifikan $\alpha < \text{nilai signifikan } \alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan Hipotesis diterima dapat disimpulkan bahwa Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

4.1.4.

PengaruhPengawasansecaraparsialterhadapPengelolaan Dana Desauntukmewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Pengawasan (X4) memiliki nilai $t_{hitung} =$

$1,027 < \text{nilai } t_{tabel} = 1,997$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Variabel Pengawasan memiliki taraf signifikan $\alpha > \text{nilai signifikan } \alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan Hipotesis tidak diterima dapat disimpulkan bahwa Pengawasan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

4.1.5. **PengaruhAkuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan PengawasansecarasimultanterhadapPengelolaan Dana Desauntukmewujudkan *Good Governance* pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo**

Hasil uji F menunjukkan bahwa memiliki nilai $F_{hitung} = 95,541 > \text{nilai } F_{tabel} = 3,98$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Nilai signifikan α dari $F_{hitung} = 0,000$ dan nilainya $< \text{nilaisignifikan } \alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan Hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance* menunjukkan bahwa pemerintah desa

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo telah akuntabilitas yaitu dengan menyajikan laporan realisasi keuangan desa serta dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai Desa sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah desa pada Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan informasi. Selain itu, masyarakat juga diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Akan tetapi pemerintah desa pada Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo belum merasakan adanya pengawasan dari pihak BPK atau Pemerintah di atasnya.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. akuntabilitas pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.
2. Berdasarkan Uji t dapat disimpulkan bahwa transparansi pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo berpengaruh secara

parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.

3. Berdasarkan Uji t dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.
4. Berdasarkan Uji t dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.
5. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengawasan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada responden di desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
6. Hasil Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,853. Hal ini berarti sebesar 85,3% pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan sedangkan sisanya yaitu 14,7% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor variabel diluar penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih baik pada pemerintah desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dimasa yang akan datang saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo diharapkan dapat menyampaikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk melaporkan pengelolaan dana desa, serta menyampaikan informasi melalui media lainnya yang mudah diakses untuk menunjang terjadinya transparan bagi pemerintah desa kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan.
2. Bagi pemerintah desa agar menciptakan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yang ekonomis, efisien, dan efektif, dan tetap mempertahankan pengawasan untuk mencapai pemerintah yang baik (*Good Governance*).
3. Perlunya pemerintah desa untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, serta lebih aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, karena jika adanya pengawasan yang baik akan

menghasilkan hasil yang baik pula yaitu tidak terjadinya penyimpangan dana desa tersebut. Pemerintah desa juga perlu mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner, peneliti sebaiknya menjelaskan tujuan dan sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas. Variabel dalam penelitian ini juga dapat lebih diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa. Seperti menambahkan variabel yang tidak berpengaruh dalam skripsi ini dan lebih memperlihatkan pengawasan agar hasilnya sesuai yang diharapkan yaitu berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, Lucy dan Lismawati, Husaini.2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budiardjo, 2007. *Pengaruh Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tebing Tinggi Empat Lawang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Fahmi, 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan*

- Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintahan. Skripsi Universitas Riau. 2017
- Ghozali, 2016. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Handoko, 2009. Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Sabdodadi di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta). Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018
- <http://www.jambiindependen.co.id/2016/03/20/penyelewengan.dana.desa>, diakses 27 Maret 2018.
- <http://s.bps.go.id/skd2020bungo/kecamatan.tanah.sepenggal.lintas.dalam.angka>, diakses 28 September 2020
- Indriantoro, Supomo. 2014. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kadarman, 2001. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan pada pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. JOM. FEKON VOL. 2. NO 2
- Kristianten, 2006. Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Vol. 2 No. 1 April, Hal 67-69.
- Lalolo, 2007. *Akuntansi Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP SPM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2013. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan pada pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. JOM. FEKON VOL. 2. NO 2
- Melayu, 2006. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Panduan, Buku. 2019. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*. Padang: Jaya Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008, tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Desa Dan Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2019, Tentang Mekanisme dan Penyaluran Dana Desa.
- PTO PNPM PPK, 2007. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Erlangga
- PP No. 101, 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*. Di akses dari :www.lan.go.id, tanggal 20 mei 2019.
- Rosidi, Anggraeni. 2019. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Satriadi, 2016. *Manajemen Sektor Publik* Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Solekhan (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Setara Press
- Sutoro Eko, dkk. 2016. *Membangun Indonesia*. Penerbit Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tilaar, 2009. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa. Vol. 1 No. 2 Maret, Hal 134-153.
- Umar, Syawalina, dan Kharunisa, 2018. Pengaruh Tansparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang